

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta
- Burhan Ashofa, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- H. Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- J. Guwandi, 2007, *Pasien dan Hukum cetakan ke-2*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marmi, 2014, *Etika Profesi Bidan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung
- Perwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- R. Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Yogyakarta
- Sarwono Prawirohardjo, 2010, *Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Veronica Komalawati, 1999, *Perananan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

### **Jurnal**

Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 6, Agustus 2016

R.A. Antari Innaka Turingsih, 2012, *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.24 No.2

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325) .

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Men.Kes/X/1983 Tentang Kode Etik Kedokteran.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PUU-XIII/2015 perihal Peninjauan Pengujian Ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 14 Desember 2016.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Amalia, Emma, 2020, Hubungan Hukum Bidan Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Persalinan (Studi Kasus Puskesmas Kandeman, Batang), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Lontoh, Diana Devlin, 2008, Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yunanto, 2009, “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik”, Tesis,  
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

**Internet**

KompasTV, “Telat Tangani Pasien, Izin Bidan Dicabut”,  
<https://www.kompas.tv/article/94091/telat-tangani-pasien-izin-bidan-dicabut>, diakses pada 13 September 2022.